

KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK ANAK BERBAKAT

Fuat Nashori
Universitas Gadjah Mada

Pemerintah semakin menyadari perlunya anak-anak berbakat mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat mengaktualisasikan kemampuannya secara penuh. Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro beberapa waktu lalu. Dikatakan oleh Mendikbud bahwa perhatian khusus terhadap anak-anak unggul (anak berbakat) akan mendorong kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong masa depan. Tak lama kemudian, A. Watik Pratiknya (staf ahli Mendikbud) mengintroduksi rencana baru Pemerintah untuk menyelenggarakan sekolah unggul bagi siswa yang mempunyai kemampuan rata-rata.

Tentu saja perhatian pemerintah terhadap anak berbakat ini layak mendapat respons yang positif. *Pertama*, anak berbakat adalah aset (umat manusia dan) bangsa. Kebijakan yang kurang memperlakukan mereka sebagaimana mestinya berarti menelantarkan aset nasional. Sebaliknya, adanya suatu kebijakan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus kepada mereka berarti mendayagunakan sumber-sumber pengembangan bangsa.

Kedua, anak adalah pribadi-pribadi yang mempunyai keistimewaan khusus dan mereka hanya bisa berkembang bila berada dalam lingkungan (pendidikan) yang merangsang berkembangnya potensi-potensi istimewa mereka. Kebijakan pendidikan yang "pukul rata" dan tidak memberikan pelayanan khusus kepada mereka menyebabkan upaya pengembangan potensi pribadi mereka tidak bisa optimal. Sebagaimana pribadi yang harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri (dan Tuhannya), mereka adalah pihak yang tak berdaya dikarenakan sistem pendidikan yang kurang memungkinkan teraktualisasikannya potensi besar mereka.

Tulisan ini mencoba menyoroti kebijakan pemerintah terhadap anak berbakat serta beberapa pemikiran untuk menanganinya anak berbakat Indonesia.

Merunut Jejak Ke Belakang

Kalau tahun-tahun belakangan ini perhatian Pemerintah terhadap anak berbakat terasa sepi-sepi saja, itu bukan berarti selama ini Pemerintah tidak melakukan apa-apa. Yang benar adalah tidak adanya konsistensi, sehingga terjadi fluktuasi. Perhatian terhadap anak berbakat mengalami pasang surut, yang dikarenakan komitmen pemerintah selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Kalau kita runut sejarahnya, maka perhatian Pemerintah terhadap anak berbakat sebenarnya telah dimulai semenjak Pelita II (1974-1979). Mulai tahun 1974, Pemerintah memberikan beasiswa kepada siswa-siswa Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan (umum maupun kejuruan) dan mahasiswa yang berprestasi tinggi di sekolah (Depdikbud). Perhatian yang lebih strategis dimulai tahun 1975, dengan diselenggarakannya *Seminar Pengembangan Pendidikan Khusus*. Seminar yang diadakan Depdikbud (dulu Departemen P dan K) pada 15-17 September 1975 itu berhasil merumuskan pengertian anak-anak berbakat, keberbakatan (*giftedness*), dan arah umum pengembangan anak berbakat di Indonesia.

Pada Pelita III (1979-1984) langkah-langkah yang lebih sistematis telah diambil untuk merencanakan dan mempersiapkan pelayanan untuk anak berbakat. Mulai tahun 1983, terbentuk *Proyek Pelayanan Pendidikan Anak Berbakat* yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). Proyek percontohan ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan beberapa SMP dan SMA "favorit" di Jakarta dan Cianjur. Dari proyek ini diharapkan akan berhasil dirumuskan suatu model pendidikan anak berbakat yang sesuai untuk masyarakat Indonesia. Proyek ini memberikan pelayanan istimewa pada siswa-siswa yang berbakat khusus dengan metode pengayaan (*enrichment*) materi pelajaran bagi para siswa.

Proyek di atas diperkuat dan didukung oleh konstitusi. Pada tahun 1983, untuk pertama kalinya masalah anak berbakat masuk dalam GBHN. Dalam GBHN 1983 dinyatakan secara eksplisit bahwa Pemerintah memberi perhatian khusus kepada mereka yang memiliki bakat yang luar biasa dalam rangka aktualisasi diri mereka sepenuhnya.

Yang sangat disayangkan adalah pada tahun 1986 proyek strategis tersebut dihentikan oleh Mendikbud Fuad Hassan dengan alasan: *tidak ada dana*. Tentu saja penghentian proyek ini mendapat reaksi keras, terutama ahli pendidikan dan ahli Psikologi. Tetapi, Mendikbud yang ahli Psikologi itu jalan terus dengan "kebijakan" penghentian proyek strategis itu.

Yang cukup melegakan para peminat masalah anak berbakat adalah pada tahun 1989 masalah anak berbakat mendapat perhatian kembali dari Pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa warga negara yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak mendapatkan perhatian khusus.

Semasa Fuad Hassan menjadi Mendikbud perhatian khusus dalam UU tak banyak berarti. Harapan kita adalah Mendikbud Wardiman benar-benar memberi perhatian khusus, perhatian khusus dalam arti yang sebenarnya!!!

Menghitung Jumlah Kerugian

Diakui bahwa peranan kebijakan Pemerintah sangat besar artinya dalam upaya menangani anak-anak berbakat. Suatu kebijakan yang memberi perhatian khusus terhadap anak berbakat berarti terdapatnya usaha untuk menjaga agar potensi mereka dapat berkembang. Nyatanya selama ini kebijakan itu baru kebijakan umum dan belum diterjemahkan dalam langkah nyata. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa selama ini kita membiarkan bangsa ini mengalami kerugian. Kita rugi, karena putra-putra terbaik bangsa ini tertelantarkan.

Pertanyaannya, seberapa besar jumlah anak berbakat yang dirugikan? Sejauh ini tidak ada seorang ahli pun yang bisa memberikan angka pasti berapa jumlah anak berbakat di Indonesia, karena memang belum ada penelitian tentang hal itu. Pihak Depdikbud memperkirakan bahwa jumlah anak unggul (berbakat) adalah lima persen dari seluruh siswa SD sampai SMA. Jumlah siswa SD sampai SMA saat ini jumlahnya sekitar 40,5 juta jiwa. Itu berarti jumlah anak berbakat di Indonesia adalah sekitar 2 juta jiwa.

Sementara itu ahli Psikologi Pendidikan SC. Utami Munandar mengatakan bahwa di manca negara jumlah anak berbakat dalam masyarakat umumnya dua persen. Kalau angka ini diproyeksikan ke Indonesia, maka jumlah anak berbakat di Indonesia adalah 3,6 juta jiwa. Angka ini adalah dua persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 180 juta jiwa.

Di negara-negara maju (Eropa dan Amerika), di antara anak-anak berbakat itu ada yang berprestasi baik, ada pula yang menjadi *Anak Berbakat Berprestasi Kurang* (ABPK) atau *underachiever*. Mereka mempunyai potensi besar, tetapi prestasi aktual yang diperolehnya jauh di bawah potensi

yang dimiliki. Menurut penelitian di Belanda ditemukan bahwa 30% dari siswa-siswa berbakat adalah ABPK. Di Amerika Serikat, angka ABPK lebih besar lagi. Menurut Alter (1954), sekitar 40% anak berbakat tidak mampu berprestasi di sekolah. Bahkan, Marland (1972) menemukan angka yang lebih besar lagi.

Lalu, berapa besar jumlah ABPK di Indonesia? Kita tidak bisa menjawabnya secara pasti. Akan tetapi, dengan logika yang sederhana kita dapat mengatakan bahwa di negara-negara yang memberi pelayanan khusus untuk anak berbakat, jumlah ABPK bisa mencapai 50%. Lebih-lebih di Indonesia yang tidak memberi pelayanan khusus terhadap anak berbakat. Bisa jadi sekitar 90% anak berbakat di Indonesia adalah ABPK. Artinya, sekitar 3,24 juta jiwa anak berbakat di Indonesia selama ini tertelantarkan. Artinya lagi, selama ini kita mengalami berupa tak teraktualisasikan-potensi anak berbakat yang berjumlah 3,24 juta jiwa!

Menuju Kebijakan Baru

Anak berbakat, yaitu mereka yang mempunyai kecerdasan umum tinggi, mempunyai kreativitas, dan mempunyai komitmen terhadap tugas yang tinggi, kalau ditangani secara khusus akan merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Sebaliknya, penelantaran terhadap mereka adalah tindakan yang merugikan bangsa. Menurut Utami Munandar, beberapa lulusan Sekolah Khusus yang diadakan di Jakarta dan Cianjur (1983-1986) mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikan di Belanda. Di antara mereka ada yang berhasil dengan predikat Cum Laude. "Ini prestasi tersendiri, karena predikat ini jarang dimiliki, apalagi oleh mahasiswa yang bukan berbahasa Belanda," tutur Utami. Coba kita bayangkan betapa ruginya bila orang-orang unggul tersebut lebih suka memilih hidup (dan mengabdikan) di Belanda daripada kembali ke tanah air untuk mengembangkan ilmunya.

Oleh karena itu, kebijakan baru dalam penanganan anak berbakat harus secara nyata dirumuskan dan dilaksanakan. Kebijakan umum telah digariskan (yaitu UU No. 2 Tahun 1989 dan GBHN). Tugas Pemerintah (c.q. Mendikbud) pada saat ini adalah merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih operasional.

Pertama, menyusun kurikulum pendidikan khusus anak-anak berbakat. Kurikulum ini berorientasi pada pengembangan siswa menjadi manusia seutuhnya, dengan mengembangkan aspek biologis, rasio, rasib, sosial dan spiritual siswa secara integratif. Model-model pendidikan yang dikembangkan adalah dengan mendirikan sekolah khusus anak-anak berbakat. artinya sekolah tersebut hanya berisikan anak-anak berbakat. Bisa pula dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada dengan memberi pelayanan khusus bagi siswa yang berbakat. Mereka dikembangkan dengan mengikuti sistem percepatan (loncat kelas) dan pengayaan (penambahan materi pelajaran).

Kedua, mengingat anak berbakat bukan hanya anak yang unggul dari segi kecerdasan saja tapi juga yang unggul dalam hal kesenian, olahraga, dan kepemimpinan, maka pelayanan khusus juga diberikan kepada anak-anak berbakat tersebut.

Ketiga, siswa-siswa yang direkrut bukan hanya siswa-siswa yang benar-benar berprestasi unggul, tetapi juga siswa-siswa yang berpotensi unggul.

Keempat, kriteria utama yang digunakan untuk menilai keberbakatan adalah kecerdasan (di atas 130) dan kreativitas. Kedua kriteria tersebut adalah kriteria yang harus ada.

Kelima, perlu dibentuk tim khusus oleh Depdikbud untuk mengelola proyek strategis ini sekaligus mewujudkannya.

Keenam, melibatkan pihak swasta (lembaga pendidikan, lembaga sosial, maupun lembaga ekonomi) untuk terlibat dalam penanganan anak-anak berbakat.

Ketujuh, penanganan atau pengelolaan anak-anak berbakat ini perlu dilakukan dengan menganut sistem desentralisasi. Pemerintah pusat lebih berperan sebagai pendorong dan pengawas, sementara penanganan operasional lebih diserahkan kepada lembaga-lembaga seperti pemerintah daerah atau lembaga-lembaga pendidikan.

Daftar Pustaka

- Achir, Yaumil Agoes. 1990. *Bakat dan Prestasi: Studi Perbandingan Mengenai Faktor-faktor Non-Intelektif Antara Anak Berbakat Yang Berprestasi dan Anak Berbakat Yang Berprestasi Kurang Melalui Pendekatan terhadap Siswa dan Orangtua pada Dua Sekolah Menengah Atas di Jakarta*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana UI.
- Monks, F.J., Knoers, A.M.P., & Haditono, S.R. 1989. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munandar, S.C. Utami & Semiawan, Conny. (1992). Tinjauan tentang Kerugian Bagi Anak Berbakat (Kasus Indonesia). *Majalah Psikomedia*, Edisi 11/Tahun IV/1992, hal. 20-23.
- Nashori, Fuat. (1993). Anak Berbakat. *Majalah Suara Muhammadiyah*, No. 12/78/1993, hal. 48-49.
- Nashori, Fuat. (1994). Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Sebuah Perspektif Psikologi Transpersonal. *Majalah Rindang*, Maret 1994.

Penulis, lahir di Mojokerto pada 23 Desember 1970. adalah Pemimpin Umum/Penanggung Jawab Jurnal *Pemikiran Psikologi Islami KALAM* Yogyakarta; mantan Pemimpin Redaksi *Majalah Mahasiswa Psikologi Indonesia PSIKOMEDIA* Yogyakarta; editor buku *Membangun Psikologi Islami, Psikologi dan Agama: Menuju Psikologi Islami serta Pendidikan dan Pengasuhan Anak: Prinsip dan Teknik Modern*; menulis lebih dari dua ratus artikel di *Pelita*, *Jawa Pos*, *Republika*, *Panji Masyarakat*, *Surabaya Post*, *Suara Muhammadiyah*, *Anda*, *Rindang*, *Semesta*, *Mimbar Pembangunan Agama (MPA)*, *dsh*; serta tiga kali berturut-turut (1991, 1992, 1993) dinobatkan sebagai pemegang ranking pertama mahasiswa berprestasi bidang non-akademik/komunikasi-publikasi UGM.